Penguatan Kewargaan Digital Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Mendukung SDGs pada Era Society 5.0 di Kalangan Komunitas Migran di Penang, Malaysia

Yuyus Kardiman /Universitas Negeri Jakarta/ yuyus-kardiman@unj.ac.id
Nadiroh/Universitas Negeri Jakarta/nadiroh@unj.ac.id Maiwan/Universitas Negeri Jakarta/maiwan@unj.ac.id
Iqbal/Universitas Negeri Jakarta/ Febriansyah/University Sain Malaysia

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat pada era Society 5.0 telah mengubah pola interaksi sosial, partisipasi kewargaan, serta identitas kebangsaan lintas batas negara. Komunitas migran Indonesia di Penang, Malaysia menghadapi peluang sekaligus tantangan dalam beradaptasi dengan masyarakat digital tanpa kehilangan nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan kewargaan digital berbasis nilai-nilai kebangsaan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) pada komunitas migran. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis konseptual. Kajian ini menelaah hubungan antara kewargaan digital, nilai-nilai kebangsaan, Society 5.0, dan kerangka SDGs. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewargaan digital tidak hanya dimaknai sebagai literasi digital, tetapi juga mencakup partisipasi etis, tanggung jawab sipil, keterlibatan demokratis, dan keadilan sosial dalam ruang digital. Penguatan kewargaan digital melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai, pemberdayaan literasi digital, partisipasi kewargaan diaspora, serta kolaborasi kelembagaan dapat mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 8 (Pekerjaan Layak), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Pada era Society 5.0, komunitas migran tidak hanya menjadi aktor ekonomi, tetapi juga warga global yang merepresentasikan identitas bangsa dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kewargaan Digital, Nilai-Nilai Kebangsaan, SDGs, Society 5.0, Komunitas Migran, Penang

Pendahuluan

Globalisasi dan transformasi digital telah mengubah secara signifikan makna kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Munculnya konsep Society 5.0 yang diperkenalkan oleh Japan menekankan pentingnya masyarakat berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), robotika, dan big data untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, kewarganegaraan tidak lagi terbatas pada batas-batas teritorial negara, melainkan meluas ke ruang digital yang melahirkan konsep kewargaan digital.

Kewargaan digital merujuk pada norma perilaku yang bertanggung jawab, etis, dan aktif dalam lingkungan digital. Kewargaan digital mencakup literasi digital, etika digital, partisipasi sipil, kesadaran hukum, tanggung jawab siber, dan keterlibatan kritis dalam komunitas daring. Bagi komunitas migran, kewargaan digital menjadi sangat penting karena mereka hidup dan berinteraksi melintasi batas negara sambil tetap mempertahankan hubungan sosial, politik, dan emosional dengan negara asal.

Komunitas migran Indonesia di Penang merupakan kelompok diaspora strategis di Asia Tenggara. Sebagai pekerja, mahasiswa, akademisi, dan profesional, mereka secara aktif memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan

partisipasi kewargaan. Namun, ekspansi kehidupan digital juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, eksploitasi siber, melemahnya identitas nasional, dan menurunnya tanggung jawab kewargaan.

Nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada Pancasila memberikan fondasi moral dan filosofis yang penting bagi kewarganegaraan Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Integrasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam kewargaan digital dapat memperkuat identitas kewargaan migran sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Paper ini membahas bagaimana penguatan kewargaan digital berbasis nilai-nilai kebangsaan dapat mendukung implementasi SDGs pada komunitas migran di Penang pada era Society 5.0.

Tinjauan Pustaka

Kewargaan Digital

Menurut Ribble (2015), kewargaan digital adalah penggunaan teknologi secara bertanggung jawab oleh setiap individu yang menggunakan komputer, internet, dan perangkat digital untuk berinteraksi dalam masyarakat. Ia mengidentifikasi sembilan elemen utama kewargaan digital, yaitu: 1) Akses digital; 2) Perdagangan digital; 3) Komunikasi digital; 4) Literasi digital; 5) Etika digital; 6) Hukum digital; 7) Hak dan tanggung jawab digital; 8) Kesehatan dan kesejahteraan digital; 9) Keamanan digital.

Kewargaan digital tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kesadaran etis dan tanggung jawab sipil. Dalam konteks migran, kewargaan digital juga melibatkan identitas transnasional dan partisipasi lintas batas.

Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pancasila

Pancasila merupakan dasar filosofis identitas nasional Indonesia sekaligus landasan utama pendidikan kewarganegaraan. Pancasila memuat lima sila utama: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima prinsip tersebut tetap relevan dalam masyarakat digital karena menjadi pedoman perilaku daring, interaksi lintas budaya, partisipasi demokratis, dan solidaritas sosial.

Society 5.0, SDGs dab Komunitas Migran

Society 5.0 merupakan konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah Japan untuk menciptakan “super-smart society” atau masyarakat super cerdas. Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang berfokus pada efisiensi dan otomatisasi, Society 5.0 menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat utama pemanfaatan teknologi.

Bagi komunitas migran, Society 5.0 membuka peluang seperti pekerjaan jarak jauh, pendidikan digital, kewirausahaan, dan partisipasi kewargaan, tetapi juga menghadirkan risiko seperti eksklusi digital, kejahatan siber, dan fragmentasi identitas.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat berkaitan dengan pemberdayaan komunitas migran. Tujuan yang relevan meliputi: 1) SDG 4: Pendidikan Berkualitas; 2) SDG 8: Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi; 3) SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan; 4) SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan 5) SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Kewargaan digital dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di kalangan diaspora.

Komunitas migran yang menjadi mitra dalam melaksanakan penguatan Literasi Digital adalah Pertumbuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) yang berkedudukan di Penang Malaysia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konseptual. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan, dokumen pemerintah, dan publikasi internasional yang berkaitan dengan kewargaan digital, studi migran, Society 5.0, dan SDGs. Analisis difokuskan pada identifikasi hubungan konseptual serta strategi praktis penguatan kewargaan digital pada komunitas migran Indonesia di Penang.

Pembahasan

Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai

Salah satu strategi paling efektif adalah implementasi pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan kewargaan digital dengan nilai-nilai kebangsaan seperti yang lilakukan oleh dosen-dosen program studi Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan Fakulatas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang

melaksanakan program Pengabdian kepada masyarakat khususnya masyarakat migram di Pinang Malaysia.

Program pendidikan harus menekankan pada: 1) nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital; 2) literasi anti-hoaks dan disinformasi; 3) kesadaran konstitusional; 4) etika dan tanggung jawab siber; dan 5) partisipasi demokratis secara daring. Program ini dapat dilakukan melalui organisasi komunitas Indonesia, organisasi diaspora, perguruan tinggi, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Strategi ini mendukung SDG 4 melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Literasi Digital yang Melampaui Keterampilan Teknis

Banyak migran menggunakan platform digital secara intensif, tetapi belum memiliki literasi digital kritis yang memadai. Penguatan literasi digital harus mencakup: 1) kemampuan verifikasi informasi; 2) pengenalan manipulasi digital; 3) pemahaman hukum siber; 4) perlindungan privasi digital; 5) penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Literasi digital harus bersifat transformatif, bukan sekadar operasional. Hal ini berkontribusi pada SDG 10 dan SDG 16 melalui pengurangan kesenjangan dan penguatan tanggung jawab kewargaan.

Partisipasi Kewargaan Diaspora

Platform digital memungkinkan migran tetap terhubung dengan Indonesia melalui partisipasi kewargaan seperti: a) partisipasi dalam pemilu luar negeri; b) forum komunitas diaspora; c) kampanye sosial daring; d) voluntarisme digital; e) kolaborasi sosial dengan institusi di Indonesia. Hal ini memperkuat demokrasi kewargaan dan tanggung jawab sosial lintas batas negara. Strategi ini mendukung SDG 16 dan SDG 17.

Dialog Lintas Budaya dan Kohesi Sosial

Migran di Penang hidup dalam lingkungan multikultural. Kewargaan digital juga harus mencakup kompetensi antarbudaya dan kehidupan damai bersama. Program seperti webinar lintas budaya, forum pertukaran pemuda, digital storytelling, dan kampanye perdamaian digital dapat memperkuat toleransi dan mencegah diskriminasi. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila dan tujuan masyarakat damai yang inklusif.

Kolaborasi Kelembagaan dan Dukungan Kebijakan

Penguatan kewargaan digital membutuhkan kolaborasi antara: a) Kedutaan Besar Republik Indonesia; b) Kementerian Luar Negeri; c) Kementerian Pendidikan; d) lembaga perlindungan pekerja migran; e) perguruan tinggi; f) NGO; dan g) organisasi diaspora. Integrasi kebijakan menjadi penting agar program berjalan berkelanjutan dan berdampak luas.

Tantangan

Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain: Tantangan Internal, mulai dari rendahnya kesadaran kewargaan, terbatasnya pemahaman etika digital, lemahnya keterikatan terhadap nilai kebangsaan, juga adanya kesenjangan generasi antar migran itu sendiri. Sementara tatangan secara ekternal, berupa adanya keterbatasan hukum di negara tujuan, eksploitasi siber, disinformasi, diskriminasi algoritmik, juga masih lemahnya koordinasi kelembagaan. Mengatasi tantangan tersebut membutuhkan komitmen jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor.

Kesimpulan

Penguatan kewargaan digital berbasis nilai-nilai kebangsaan merupakan kebutuhan mendesak pada era Society 5.0, khususnya bagi komunitas migran di Penang. Kewargaan digital tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi sebagai partisipasi etis, sipil, dan demokratis dalam masyarakat digital. Bagi migran Indonesia, Pancasila menjadi kompas moral yang menjaga identitas nasional sekaligus membimbing partisipasi dalam kehidupan global digital. Melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai, pemberdayaan literasi digital, keterlibatan diaspora, dialog lintas budaya, dan kolaborasi kelembagaan, komunitas migran dapat menjadi aktor strategis dalam mendukung implementasi SDGs. Pada akhirnya, migran tidak hanya menjadi kontributor ekonomi, tetapi juga duta nilai kebangsaan, kewargaan demokratis, dan pembangunan global berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNJ yang telah menfasilitasi Pembiayaan kegiatan ini melalui HIBAH DIPA PTNBH UNJ, serta pihak PERMAI Penang Malaysia yang telah menjadi mitra dalam kegiatan ini.

Daftar Pustaka

Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher, 37*(3), 129–139.

Bennett, W. L. (2008). *Civic life online: Learning how digital media can engage youth*. MIT Press.

Cabinet Office, Government of Japan. (2020). *Society 5.0*. Tokyo: Government of Japan.

Cogan, J. J., & Derricott, R. (2000). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. London: Routledge.

Kemlu RI. (2023). *Peran diaspora Indonesia dalam diplomasi global*. Jakarta: Ministry of Foreign Affairs.

OECD. (2021). *Digital education outlook*. Paris: OECD Publishing.

Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). ISTE.

UNESCO. (2022). *Global citizenship education for sustainable development*. Paris: UNESCO.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.